



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018

INFORMASI PROGRAM

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2018



psma.kemdikbud.go.id



[direktorat.pdma](https://www.facebook.com/direktorat.pdma)



[direktorat.pdma](https://twitter.com/direktorat.pdma)



[direktorat.pdma](https://www.instagram.com/direktorat.pdma)



[DITPSMA KEMDIKBUD](https://www.youtube.com/DITPSMA_KEMDIKBUD)

TIM PENYUSUN

**PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN DEKONSENTRASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN ANGGARAN 2018**

Diterbitkan

**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pengarah

Purwadi Sutanto
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Penanggung Jawab

Suhadi

Koordinator dan Editor

Eko Warisdiono
Suharlan
Harizal

Tim Penyusun

1. Muamar Surawidarto
2. Luna Titi Aprilyana
3. Jim Bar Pen
4. Nurul Mahfudi
5. Wiwiet Heriyanto
6. Uce Veriyanti
7. Muhammad Adji
8. Kodni Efsandia
9. Anissa Rahmayanti
10. Efendi Sinaga

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesainya buku "Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018". Buku informasi ini didalamnya berisi tentang program dan kebijakan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018 yang ditujukan kepada para yang terkait di seluruh wilayah Indonesia selama tahun 2018 ini.

Buku ini sebagai salah satu upaya untuk menyatukan pandangan dan keinginan pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan SMA Tahun 2018. Inti dari buku ini memuat berbagai informasi mengenai program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Tahun 2018. Penyampaian informasi mengenai program ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami di dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, sekolah, masyarakat maupun lembaga lainnya dalam merumuskan kebijakan dan membangun pendidikan SMA agar terwujud layanan pendidikan SMA yang berkualitas.

Buku ini terdiri atas informasi-informasi program dari Subdit Program dan Evaluasi, Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Subdit Peserta Didik, Subdit Kurikulum.

Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat bagi semua pihak dalam upaya bersama meningkatkan akses, kualitas layanan serta mutu pembelajaran secara merata di seluruh tanah air.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama hingga terbitnya buku ini.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Pembinaan SMA,



Purwadi Sutanto
NIP. 196104041985031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi II

Daftar Tabel III

Daftar Gambar IV

BAB I KEBIJAKAN UMUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 1

A. Pendahuluan 1

B. Identifikasi Potensi dan Masalah 3

C. Orientasi Program 7

D. Strategi Umum 9

BAB II RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2018 13

A. Rencana Pembangunan Pendidikan SMA, Visi, Misi 13

B. Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 16

C. Sasaran Program Direktorat Pembinaan SMA 2018 17

D. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA 19

BAB III ORGANISASI DAN STRUKTUR 23

A. Organisasi Pelaksana 23

B. Rincian Tugas dan Fungsi 25

C. Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018 25

D. Alokasi Anggaran 2018 pada Setiap Subdirektorat 28

BAB IV PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2018 33

A. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA 33

B. Pembangunan Sarana Prasarana Melalui DAK 34

**C. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas
Dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat 35**

**D. Peningkatan Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan
SMA yang Berorientasi Pada Pembentukan Karakter 36**

**E. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan
Akuntabel dengan Melibatkan Publik 48**

**F. Rekapitulasi Program Prioritas Direktorat Pembinaan
SMA Tahun 2018 50**

**G. Deskripsi Program Bantuan Direktorat Pembinaan
SMA Tahun 2018 51**

BAB V PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan SMA 16

Tabel 2.2. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3) 17

Tabel 2.3. Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5) 18

Tabel 2.4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (T8) 18

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Kegiatan Dit. PSMA 19

Tabel 3.1. Anggaran Direktorat PSMA Tahun 2018 PerSubdirektorat 26

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran 2018 Per Jenis Belanja 27

Tabel 4.1. Tahapan OSN 43

Tabel 4.2. Olimpiade Sains Internasional 43

Tabel 4.3. Tahapan OPSI SMA Tahun 2018 46

Tabel 4.4. Tahapan FIKSI SMA Tahun 2018 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 3

Gambar 1.2. Daya Saing Indonesia di Mata Internasional 4

Gambar 1.3. Proyeksi Demografi Indonesia hingga Tahun 2050 5

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA 23

**Gambar 3.2. Presentase Anggaran Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2018 per Subdit 27**

Gambar 3.3. Presentase Alokasi Anggaran 2018 Per Jenis Belanja 28



SISWA SMA
PESERTA
HEROIAN A.
JAWA SELATAN

BAB I

KEBIJAKAN UMUM

DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

A. Pendahuluan

Tahun 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) ke III (2015-2019). Secara umum, tujuan pembangunan pendidikan pada RPJMN ke III pada periode ini adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumberdaya Manusia yang berkualitas, serta peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan pendidikan pada periode 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Indonesia yang memiliki kompetensi dan berdaya saing regional. Tema pembangunan pendidikan tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam meghadapi pasar bebas ASEAN yang akan dimulai dalam periode RPJMN ke III ini.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019 tersebut, maka pemerintah telah menetapkan prioritas Nasional Bidang Pendidikan yakni "Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat". Pendidikan menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia di era globalisasi ini.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA merumuskan tujuan strategis dalam pembangunan pendidikan SMA yaitu: peningkatan akses layanan pendidikan SMA yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, dan peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Seluruh program Direktorat Pembinaan SMA diarahkan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dalam upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan SMA yang terjangkau dan berkualitas, maka Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan program pembangunan ruang belajar SMA dan Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan SMA, Direktorat Pembinaan SMA telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, pembangunan sarana dan prasarana mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan program pembangunan peserta didik SMA.

Sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan informasi, maka disusunlah Buku Informasi Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018. Buku ini memuat berbagai informasi mengenai program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA di Tahun 2018. Penyampaian informasi mengenai program ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja kami di dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, sekolah, masyarakat maupun lembaga lainnya dalam merumuskan kebijakan dan membangun pendidikan SMA agar terwujud layanan pendidikan SMA yang berkualitas.

B. Identifikasi Potensi dan Masalah

1. Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Ekonomi Indonesia diprediksikan akan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Berdasarkan data World Bank, Indonesia memulai Tahun 2018 ini dengan fundamental ekonomi yang cukup kuat. Berdasarkan data World Bank tersebut, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 5.2% pada kuartal ke II Tahun 2017, dan diprediksi akan bertumbuh menjadi 5.3% pada Tahun 2018.

Tren pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat itu didukung pula oleh perkembangan di berbagai indikator ekonomi makro. Berdasarkan hal tersebut, maka proyeksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia semakin semakin optimis untuk terwujud. McKinsey Global Institute, memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada tahun 2030. Posisi tersebut didapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama, seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari PDB. Berikut gambaran Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menurut McKinsey Global Institute:



Sumber: Mc Kinsey Global Institute

Gambar 1.1. Tren Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Berdasarkan data dari Global Competitiveness Index (GCI), Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari peringkat 55 pada tahun 2009-2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013-2014. Berikut gambaran Daya Saing Indonesia di Mata Internasional menurut Global Competitiveness Index (GCI)

26	Country/Economy	GCI 2014-2015		GCI 2015-2016	
		Rank (out of 144)	Score	Rank (out of 148)	Score
27	France	23	5,08	23	5,08
28	Saudi Arabia	24	5,06	20	5,06
29	Ireland	25	4,98	28	4,98
30	Korea, Rep.	26	4,96	25	4,96
31	Israel	27	4,95	27	4,95
32	China	28	4,89	29	4,89
33	Estonia	29	4,71	32	4,71
34	Iceland	30	4,71	31	4,71
35	Thailand	31	4,66	37	4,66
36	Puerto Rico	32	4,64	30	4,64
37	Chile	33	4,60	34	4,60
38	Indonesia	34	4,57	38	4,57
39	Spain	35	4,55	35	4,55
40	Portugal	36	4,54	51	4,54
41	Czech Republic	37	4,53	46	4,53
42	Azerbaijan	38	4,53	39	4,53

Gambar 1.2. Daya Saing Indonesia di Mata Internasional

Dari gambar di atas indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori efficiency driven economy menjadi negara dengan kategori innovation driven yang merupakan kelompok negara-negara maju. Selain itu, ditinjau dari pencapaian Human Development Index (HDI) Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

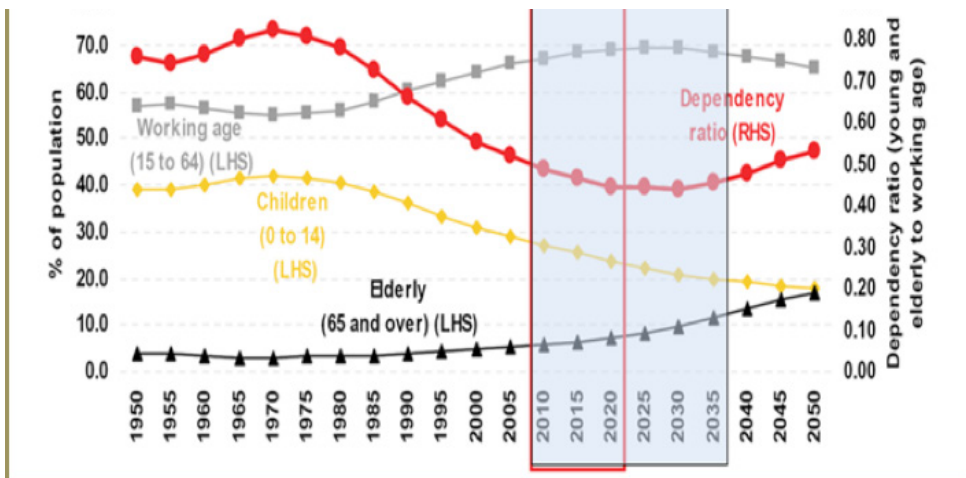
Daya saing memiliki peranan yang cukup penting ditengah era globalisasi saat ini. Seluruh Negara dituntut agar dapat memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat bertahan dan memanfaatkan kondisi yang ada saat ini. Daya saing ini tentunya ditopang oleh kualitas sumberdaya manusia yang baik. Untuk menghasilkan produk-produk yang bersaing, tentunya membutuhkan sumberdaya manusia berkualitas yang memiliki kreatifitas dan inovasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan merupakan suatu instrumen penting dalam membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas manusia (human capital). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028-2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 % dari total penduduk usia produktif di ASEAN.

Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang, dan Australia. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi “bencana demografi” karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

Indonesia adalah negara yang memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi utama (big player) dalam perekonomian global. Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia adalah besarnya jumlah penduduk dan sumberdaya manusia yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, dengan total jumlah penduduk sebesar 230 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk dengan daya beli masyarakat yang tinggi dapat menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial. Untuk itu, peningkatan sumber daya manusia menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Berikut ini adalah ilustrasi proyeksi demografi Indonesia hingga tahun 2050:



Gambar 1.3. Proyeksi Demografi Indonesia hingga Tahun 2050

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2010 s.d. 2035 komposisi demografi Indonesia didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (15 tahun s.d. 64 tahun). Kondisi ini memungkinkan Indonesia untuk menciptakan rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk yang rendah. Untuk menciptakan hal tersebut, peningkatan sumberdaya manusia mutlak diperlukan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal proporsi penduduk usia produktif yang ada. Dengan tingkat pendidikan yang baik, maka produktivitas perekonomian juga akan meningkat sehingga dapat mendorong laju percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, apabila kondisi ini tidak disertai dengan peningkatan sumberdaya manusia yang baik maka dapat menimbulkan bencana demografi.

d. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial juga menjadi suatu potensi kendala dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Berbagai masalah sosial masih menjadi permasalahan bagi bangsa ini, diantaranya adalah pornografi dan peredaran obat-obatan terlarang, radikalisme, teroris, kenakalan remaja. Berbagai hal negatif tersebut menjadi tantangan dalam pembangunan generasi muda Indonesia. Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (role model) dalam membangun karakter diri. Sementara karakter dirasakan sangat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri.

2. Identifikasi Masalah

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan berikut ini:

a. Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal

Pada masing-masing jenjang pendidikan, ada pelaku yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan masih terlampaui menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru.

b. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Ketika Rintisan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

c. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga belum mendukung upaya untuk mewujudkan kreativitas, daya kritis, dan kemampuan analisis siswa. Selama ini kompetensi sebagai hasil dari pembelajaran yang sangat penting untuk diukur dan dimiliki siswa dirasakan kurang menjadi fokus. Terdapat 4 (empat) aspek yang dikuasai oleh siswa SMA yaitu : (1) Creativity, (2) Critical Thinking, (3) Communication, dan (4) Collaboration.

C. Orientasi Program

Secara umum, program Direktorat Pembinaan SMA 2018 ditujukan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis pembangunan pendidikan SMA yakni:

1. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan SMA yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.

Pembangunan pendidikan dikaitkan dengan kebutuhan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja berkualitas dengan kualifikasi minimal berasal dari pendidikan menengah. Untuk itu, maka pemerintah berusaha meningkatkan jaminan keberlanjutan pendidikan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan Menengah. Kendala biaya dan jarak ke sekolah secara berkesinambungan direduksi melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan bagi siswa miskin. Inovasi penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi juga diterapkan agar dapat mewujudkan layanan pendidikan SMA yang berkualitas.

2. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan SMA yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter.

Tantangan pembangunan kualitas pembelajaran adalah meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut perlu ditingkatkan dengan lebih optimal dengan meningkatkan partisipasi siswa di kelas secara interaktif setidaknya minimal 60% dari keseluruhan aktivitas keseharian siswa di kelas. Melalui hal tersebut, diharapkan kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis siswa dapat meningkat. Dengan peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan di kelas diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan pendidikan.

Perbaikan kualitas pada pendidikan SMA tentunya masih perlu dikembangkan pada periode kedepan. Selain itu, terdapat tantangan dalam pelaksanaan kurikulum dengan lebih memberikan ruang gerak bagi pengembangan minat dan potensi siswa, terutama untuk menghadapi perkembangan global, serta penerapan sistem sanksi dan insentif dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.

Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu juga menjadi kunci dalam menjamin sekolah secara berkesinambungan melaksanakan peningkatan mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu ini diharapkan dapat memberikan masukan pada aspek-aspek peningkatan mutu yang harus diwujudkan. Dengan demikian pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

Penerapan kurikulum 2013 diharapkan dapat mewujudkan perubahan mindset bagi pendidik dan orang tua mengenai makna pendidikan. Hal ini menjadi semakin mendesak dalam rangka mendorong peserta didik untuk menjadi manusia yang tidak saja memiliki pengetahuan dan keterampilan namun dilengkapi dengan kepribadian yang baik untuk mendukung dirinya pada saat melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu peningkatan pendidikan agama dan kewarganegaraan serta pendidikan karakter harus terus diperkuat.

Layanan pendidikan SMA diharapkan dapat mewujudkan kualitas lulusan SMA memiliki kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi. Lulusan pendidikan SMA diharapkan dapat memiliki kompetensi 4C, yaitu:

1. Creativity atau kreativitas

Melalui kreativitas, siswa diharapkan dapat memiliki kerangka berfikir yang baik sehingga dapat menghasilkan terobosan, ide, dan inovasi baru. Kreativitas mutlak dibutuhkan dalam era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi informasi berimplikasi pada berbagai hal, termasuk potensi ekonomi. Melalui kreativitas diharapkan dapat muncul inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan pendidikan SMA harus diarahkan untuk dapat mendukung perkembangan kreativitas siswa, salah satunya melalui metode pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum 2013.

2. Critical Thinking atau berpikir kritis

Kemampuan berfikir kritis merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh siswa saat ini. Kemampuan berfikir kritis dibutuhkan dalam rangka mengidentifikasi berbagai fenomena yang terjadi untuk kemudian menyikapi fenomena tersebut. Kemampuan berfikir kritis juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi, dan mencari solusi untuk kendala tersebut. Kemampuan berfikir kritis mutlak dibutuhkan untuk menangkal berbagai paham-paham radikal ataupun isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Communication atau komunikasi

Kemampuan komunikasi merupakan suatu kompetensi yang penting untuk dapat mengaktualisasikan setiap potensi yang dimiliki. Komunikasi merupakan suatu sarana untuk mengungkapkan seluruh potensi yang dimiliki kepada orang lain. Ide ataupun gagasan yang dimiliki tentunya harus dikomunikasikan agar dapat teraktualisasi. Untuk itu, maka pembangunan pendidikan SMA juga menjadikan kompetensi ini sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran agar setiap lulusan pendidikan SMA memiliki kompetensi ini dengan baik.

4. Colaboration atau kolaborasi

Kemampuan untuk berkolaborasi juga sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Batas wilayah yang saat ini dirasakan semakin minim membuka peluang bagi setiap individu maupun kelompok untuk saling berkolaborasi. Potensi yang semakin luas tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh Bangsa Indonesia untuk membangun. Melalui kolaborasi yang baik diharapkan proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat.

3. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Agar setiap program yang telah dicanangkan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, maka pengelolaan setiap program harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparan. Upaya untuk mewujudkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel diwujudkan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung program-program prioritas Direktorat Pembinaan SMA.

Kegiatan pendukung program tersebut dilaksanakan dalam bentuk workshop, koordinasi, monitoring, dan evaluasi program. Peningkatan tata kelola juga diwujudkan melalui upaya kerjasama antar lembaga dan peningkatan sistem manajemen sekolah. Kualitas manajemen sekolah akan berimplikasi pada kualitas pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) masih menjadi dasar dalam pengelolaan SMA.

D. Strategi Umum

Untuk dapat mewujudkan tujuan strategis pembangunan pendidikan SMA, maka dibutuhkan suatu strategi sebagai landasan ataupun acuan dalam penyusunan program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018. Berikut ini adalah strategi umum Direktorat Pembinaan SMA dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pembangunan pendidikan SMA.

1. Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan SMA

Ketersediaan layanan pendidikan SMA hingga saat ini masih menjadi kendala dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Selain ketersediaan layanan pendidikan, fasilitas ruang belajar juga belum dapat menampung seluruh lulusan SMP/Mts/Sederajat. Ditengah kondisi tersebut, ruang kelas yang ada juga tidak seluruhnya dalam kondisi yang baik untuk proses pembelajaran. Upaya untuk perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan dicapai melalui program Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), dan rehabilitasi ruang belajar.

2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA

Pada tahun 2015 Angka Putus Sekolah SMA adalah sebesar 1.43% sedangkan target angka putus sekolah sampai dengan tahun 2019 sekolah SMA/SMK adalah 0,80%. Faktor dominan yang menyebabkan angka putus sekolah adalah faktor kesulitan ekonomi keluarga sehingga tidak terjangkau pendidikan bagi siswa miskin dikarenakan tingginya biaya pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan yang baik membutuhkan biaya yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesempatan yang setara (equal opportunity) untuk mendapatkan layanan pendidikan, terutama untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin, masih menjadi tantangan bagi pembangunan pendidikan SMA saat ini.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap layanan pendidikan SMA diupayakan melalui pemberian bantuan kepada siswa miskin melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA untuk menekan biaya operasional pendidikan yang dibebankan kepada orang tua.

3. Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan SMA

Layanan Pendidikan yang baik sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana mutu yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Kondisi kepemilikan sarana dan prasarana mutu tersebut, dari sisi jumlah masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain minim, penyebarannya juga belum merata di seluruh daerah, sekolah-sekolah yang memiliki sarana dan prasarana lengkap sebagian besar berada di kota besar. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab terjadi disparitas mutu sekolah. Tantangan lainnya adalah masih sangat terbatasnya jumlah peralatan laboratorium dan bahan ajar.

Hal tersebut membuat laboratorium ataupun sarana mutu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam praktek belajar mengajar. Selain itu, jumlah tenaga pengelola laboratorium juga masih terbatas. Kondisi ini menjadi penyebab belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana mutu yang dimiliki sekolah. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan diupayakan melalui program pembangunan laboratorium/ruang praktik, pembangunan perpustakaan, pembangunan ruang penunjang, dan pengadaan alat TIK (Teknologi Ilmu Komputer).

4. Peningkatan kualitas pembelajaran yang didasarkan pada pendidikan karakter

Peningkatan akses layanan pendidikan tentunya juga harus diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan lulusan SMA yang berkualitas. Secara umum, tujuan dari pendidikan SMA adalah mempersiapkan kompetensi siswa usia 16-18 tahun untuk ke Perguruan Tinggi. Untuk itu, kualitas pembelajaran harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan analitis, kreatifitas, dan akademik. Selain membangun kecerdasan secara intelektual, pendidikan SMA juga diarahkan untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki etika, moral, dan karakter yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA adalah dengan program-program kurikulum 2013, sekolah rujukan, dan pendidikan karakter bangsa.

5. Menumbuhkembangkan semangat ilmiah, kreatif, dan sportif pada peserta didik SMA.

Semangat ilmiah, kreatif, dan sportif sangat diperlukan ditengah semakin ketatnya persaingan di era globalisasi saat ini. Untuk itu, maka institusi pendidikan harus mampu membentuk lulusannya agar memiliki kompetensi yang cukup agar mampu bersaing ditingkat internasional. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan beberapa program untuk menstimulasi siswa agar memiliki semangat ilmiah, kreatif, dan sportif melalui berbagai program olimpiade keilmuan, festival seni, maupun lomba olahraga pendidikan.

6. Menumbuhkembangkan semangat siswa untuk memiliki 4 C.

SMA yang bermutu diharapkan dapat menumbuhkembangkan dan melahirkan lulusan yang akan hidup di zaman baru, dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan pergeseran kompetensi yang dibelajarkan di sekolah, menyesuaikan dengan abad 21 Century Skill Competencies, diperlukan penyesuaian dalam proses pembelajaran. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi, dicirikan dengan empat fenomena yang terjadi untuk menumbuhkembangkan semangat siswa untuk memiliki 4 C dan siap menghadapi perubahan paradigma belajar.

Pertama, perkembangan informasi membuat informasi tersedia dimana saja dan kapan saja. Hal ini berakibat, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi. Peserta didik dapat dengan mudah mengakses sumber informasi dan materi ajar. Kompetensi dalam penguasaan teknologi informasi merupakan hal yang mutlak dikuasai dan dibarengi dengan kompetensi untuk menyeleksi sumber informasi yang benar ditengah banyaknya informasi yang tidak valid kebenarannya.

Kedua, perkembangan teknologi juga melahirkan era komputerisasi, ketika aktivitas manusia lebih cepat dilakukan dengan memanfaatkan mesin. Tidak terkecuali hal-hal dalam dunia pendidikan.

Ketiga, pekerjaan rutin dan berulang akan tergantikan dengan peranti lunak dan aneka instrument. Kegiatan pembelajaran tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Misalnya dalam kegiatan penilaian dan pengadministrasian pembelajaran akan didukung aplikasi.

Keempat, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah di seluruh permukaan bumi, dari mana saja dan ke mana saja. Bukan saja komunikasi berbasis teks, melainkan komunikasi audio dan visual. Semua perubahan yang terjadi harus diikuti perkembangan dalam model pembelajaran.

7. Peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi program pembinaan SMA.

Kesuksesan implementasi dari setiap program pembangunan SMA juga ditentukan dari pengelolaan setiap program yang dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakannya. Untuk mewujudkan instansi profesional maka perlu ditingkatkan manajemen tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi. Instansi yang akuntabel dan profesional diperlukan untuk menjamin seluruh tujuan strategis yang ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan beberapa program, yakni: penyusunan perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi program, dan membina kerjasama antar lembaga.



BAB II

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2018

A. RENCANA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SMA, VISI, MISI

Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMA mulai tahun 2018 tidak lagi memiliki Visi dan misi tersendiri. Hal ini terjadi karena setiap program dari Direktorat Pembinaan SMA adalah mendukung program prioritas Presiden Republik Indonesia dan diterjemahkan amanat tersebut pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 yang mejadi prioritas Nasional Bidang Pendidikan. “Sejalan dengan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “Nawa Cita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk:

- (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- (3) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- (4) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pengaturan operasional untuk mewujudkan “Nawa Cita” dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya. Pengaturan operasional untuk mewujudkan “Nawa Cita” dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya. Visi Direktorat Pembinaan SMA adalah :

VISI

“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMA yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan Layanan Prima Pendidikan SMA”

MISI

- M1 : Mewujudkan Pelaku Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang Kuat;
- M2 : Mewujudkan Akses Sekolah Menengah Atas yang Meluas, Merata dan Berkeadilan;
- M3 : Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu dan Berkarakter pada Sekolah Menengah Atas;
- M4 : Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas.

Birokrasi dan Pelibatan Publik pada Sekolah Menengah Atas Direktorat Pembinaan SMA bertekad untuk menjadi lembaga kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pendidikan SMA yang berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otorisasi untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mewujudkan layanan prima pendidikan SMA yang terpercaya di Indonesia.

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah:

1. Sekolah yang kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif menjadinya sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi factor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting adalah Kepala Sekolah yang memimpin para pelaku menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberi masukan kepada sekolah.

4. Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya Pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggarakan satuan pendidikan. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan sendiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan Pemerintah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat berupa materi, tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah'.

5. Industri yang berperan penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting adalah dalam memecahkan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri bisa berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberi masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

7. Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah diantaranya telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional".

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar provinsi, kabupaten dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan lokasi dana Pemerintah dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

B. TUJUAN STRATEGIS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2015-2019

Tujuan strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Ditjen Dikdasmen Kemendikbud pada jenjang Sekolah Menengah Atas yang dirumuskan berdasarkan sistem tata kelola untuk menghasilkan layanan prima sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi dan Misi Ditjen Dikdasmen Kemendikbud 2015-2019, yaitu :

Tabel 2.1. Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan SMA

Kode	Tujuan Strategis SMA
T.3	Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat
T.5	Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T.8	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

C. SASARAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2018

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan SMA, diperlukan sejumlah sasaran program yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) untuk mengukur apakah sasaran program dapat mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dan selanjutnya dapat dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran Program untuk setiap tujuan tersebut adalah :

1) Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3) dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T3)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS3.1	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB)	APK SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
SS3.2	Meningkatnya rasio partisipasi perempuan dan laki-laki pada pendidikan SMA	Rasio APK perempuan : laki-laki di SMA/ sebesar 1
SS3.3	Meningkatnya ketersediaan sekolah menengah disetiap kecamatan pada tahun 2019	Seluruh kecamatan (100%) memiliki minimal satu sekolah menengah pada tahun 2019
SS3.4	Meningkatnya penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa miskin pendidikan menengah	KIP diterima oleh sekurang-kurangnya 3.858.211 siswa miskin jenjang SMA, SMK dan SMLB

2) Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5) dengan sasaran strategis, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter (T5)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS5.2	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan menengah	Rata-rata Nilai UN SMA minimal 7,0
		Persentase SMA yang memenuhi SPM sebanyak 75%
SS5.3	Meningkatnya karakter/ perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SMA minimal baik
SS5.5	Meningkatnya mutu layanan pendidikan menengah	Persentase SMA berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%

3) Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (T8), dengan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.4. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik (T8),

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS8.3	Tata Kelola Direktorat Pembinaan SMA yang baik	95% Data pendidikan SMA akurat, berkelanjutan, dan terbaru
		Mendukung nilai minimal LAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80

D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DIREKTORAT PEMBINAAN SMA

Untuk mencapai target sasaran strategis pada tahun 2019 telah ditetapkan pembabakan pencapaian target sasaran strategis per tahun yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019. Berikut tabel IKK Direktorat Pembinaan SMA:

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Kegiatan Dit. PSMA

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sasaran	Target 2015 -2019				
			2015	2016	2017	2018	2019
SK 3.1	Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di semua kabupaten dan kota						
IKK 3.1	Jumlah siswa SMA penerima BOS SM	Siswa	4,359,141	4,473,857	4,640,653	4,826,279	5,019,330
IKK 3.2	Jumlah RKB SMA yang dibangun	Ruang	2,153	4,817	1,000	1,624	4,032
IKK 3.3	Jumlah unit SMA baru yang dibangun	Sekolah	70	204	75	18	50
IKK 3.4	Pembangunan prasarana pembelajaran SMA	Ruang	66	1,177	982	1,627	1,627
IKK 3.5	Rehabilitasi prasarana pembelajaran SMA	PaketX	171	1,672	5,381	2,530	2,530
IKK 3.6	Pengadaan sarana pembelajaran SMA	Paket	553	1,053	1,979	2,154	3,662
IKK 3.7	Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Sekolah	2,156	13,419	13,517	13,615	13,700
IKK 3.8	Jumlah bahan ajar SMA yang disusun	Mapel	16	17	18	19	21

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Sasaran	Target 2015 -2019				
			2015	2016	2017	2018	2019
IKK 3.9	Jumlah SMA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Sekolah	2,251	4,852	8,012	13,615	13,700
IKK 3.10	Jumlah SMA rujukan	Sekolah	300	614	614	650	650
IKK 3.11	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran kewirausahaan	Sekolah	-	204	204	204	204
IKK 3.12	Jumlah siswa SMA yang mengikuti lomba/olimpiade, festival, debat, dan unjuk prestasi tingkat nasional dan Internasional	Siswa	2,044	2,091	3,094	3,094	3,094
IKK 3.13	Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa	Siswa	2,350	2,091	2,249	2,249	2,249
IKK 3.14	Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan pendidikan karakter	Sekolah	2,156	13,419	13,517	13,615	13,700
SK 3.2	Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin						
IKK 3.15	Jumlah siswa SMA penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Siswa	1,367,559	1,367,559	1,367,559	1,367,559	1,367,559
SK 3.3	Menguatnya Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di SMA						
IKK3.16	Jumlah Satker yang Mendapat Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis SMA	Layanan	35	35	35	35	35





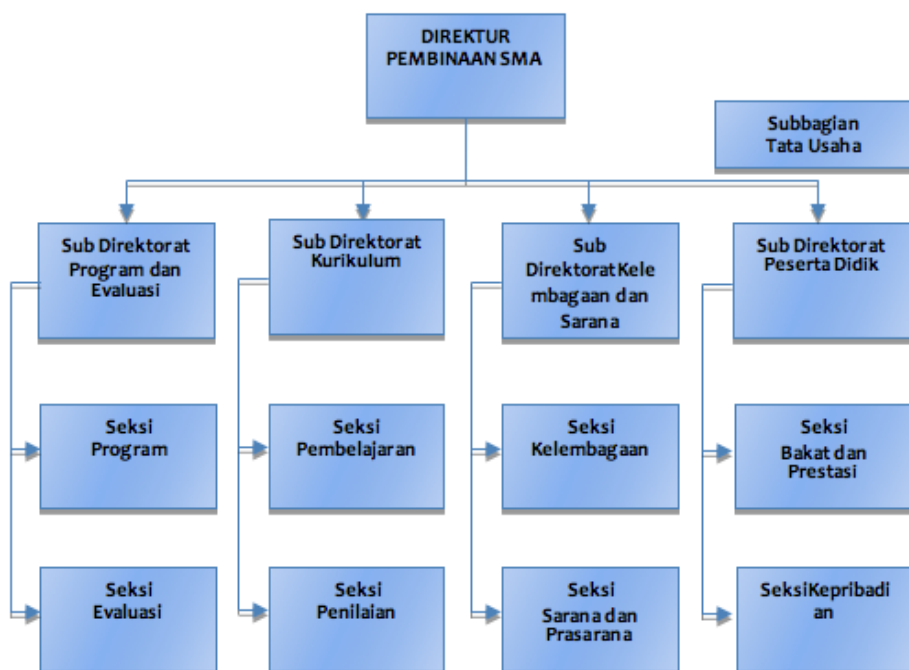
BAB III

ORGANISASI DAN STRUKTUR

Dalam rangka menjalankan visi yang ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan Peraturan Menteri nomor 11 tahun 2015.

A. ORGANISASI PELAKSANA

Secara organisasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas 4 (empat) sub direktorat, 8 (delapan) seksi dan 1 (satu) sub bagian. Bagan dan rincian detail organisasi adalah sebagai berikut



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA

1. Sub Direktorat Program dan Evaluasi

Sub Direktorat program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat. Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. Seksi Program
- b. Seksi Evaluasi

2. Sub Direktorat Kurikulum

Sub Direktorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. Seksi Pembelajaran
- b. Seksi Penilaian

3. Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas. Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. Seksi Kelembagaan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana

4. Sub Direktorat Peserta Didik

Sub Direktorat Peserta Didik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik sekolah menengah atas. Sub Direktorat Peserta Didik terdiri dari 2 seksi, yaitu:

- a. Seksi Bakat dan Prestasi
- b. Seksi Kepribadian

5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Kebudayaan pasal 408, tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SMA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408 tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola Sekolah Menengah Atas;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola Sekolah Menengah Atas;
3. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah atas;
5. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;
6. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;
7. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
8. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
9. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah atas;
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

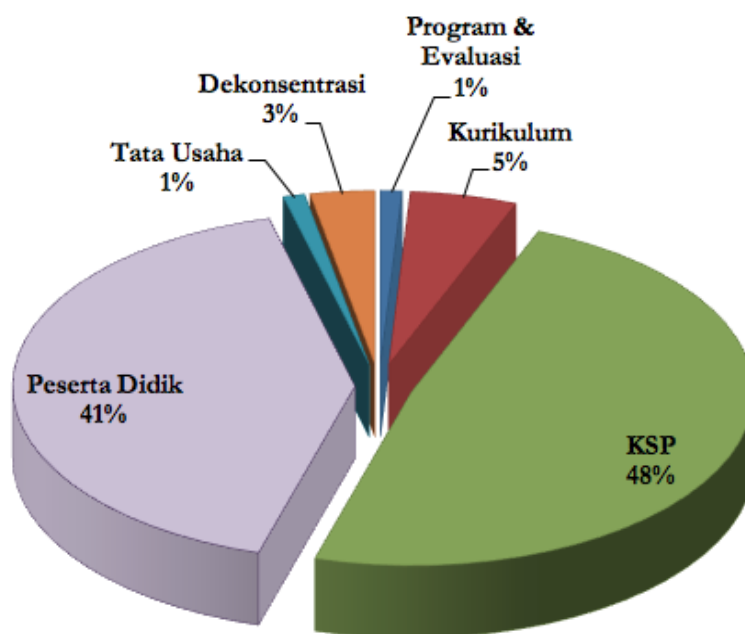
C. ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2018

Untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan dan program, Direktorat Pembinaan SMA mendapatkan alokasi anggaran APBN pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3,224,636,233,000 Alokasi anggaran ini naik sebesar Rp. 483,695,434,950 atau 15% dibanding dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 2,740,940,798,050. Pengalokasian anggaran ini difokuskan untuk pelaksanaan program rintisan wajib belajar (Wajar) 12 Tahun, melalui alokasi dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan akses dan mutu SMA.

Anggaran pendidikan SMA dialokasikan untuk pencapaian 4 misi yang diemban dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari 4 misi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan peluang yang lebih besar bagi Direktorat Pembinaan SMA untuk lebih berfokus pada usaha pada usaha mewujudkan pelaku pendidikan dasar dan menengah yang kuat, meningkatkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, meningkatkan standar pendidikan menuju pendidikan dasar dan menengah yang bermutu. Tabel dibawah menjelaskan anggaran pada setiap Sub Direktorat di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA beserta anggaran Dekonsentrasi.

Tabel 3.1. Anggaran Direktorat P. SMA Tahun 2018 Per Subdirektorat.

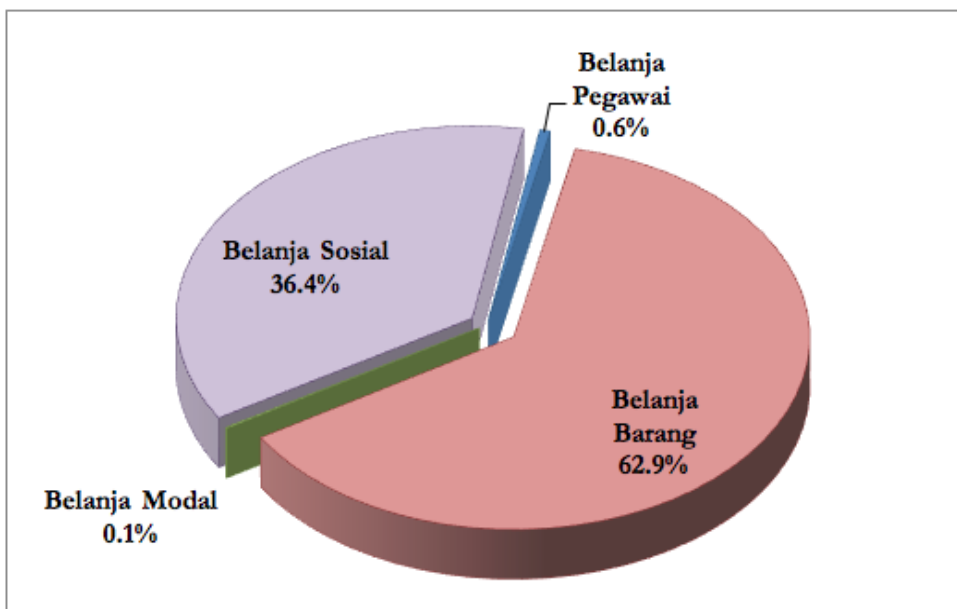
No	Kegiatan	Jumlah	Persentase
1	A. Pusat		%
	Subdit. Program dan Evaluasi	37,746,630,000	1 %
	Subdit. Kurikulum	167,679,775,000	5 %
	Subdit. Kelembagaan dan Sarana Prasarana	1,556,068,956,000	48 %
	Subdit Peserta Didik	1,336,525,196,000	41 %
	Subbag Tata Usaha	34,553,511,000	1 %
	Jumlah Pusat	3,132,574,068,000	97 %
2	B. Dekonsentrasi	92,062,165,000	3 %
	Total Alokasi Anggaran	3,224,636,233,000	100%



Gambar 3.2. Presentase Anggaran Direktorat P. SMA Tahun 2018 Per Subdirektorat

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran 2018 Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Alokasi
Pusat		3,132,574,068,000
1	Belanja Pegawai	18,226,331,000
2	Belanja Barang	1,936,332,814,000
3	Belanja Modal	3,026,423,000
4	Belanja Sosial	1.174,988,500.000
Dekonsentrasi		92,062,165,000
1	Belanja Barang	92,062,165,000
Total Anggaran		3,224,636,233,000



Gambar 3.3. Presentase Alokasi Anggaran 2018 Per Jenis Belanja

D. Alokasi Anggaran 2018 Pada Setiap Sub Direktorat

Dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan pendidikan SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur penganggaran dengan Tugas Pokok dan Fungsi setiap Subdirektorat. Berikut ini adalah struktur anggaran untuk setiap Subdirektorat dan rencana penyerapan anggaran tahun 2018.

1. Sub Direktorat Program dan Evaluasi

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
5627.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12	Layanan	37.746.630.000

2. Sub Direktorat Kurikulum

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
5627.013	Sekolah Yang Dibina Menjadi Sekolah Rujukan	650	Sekolah	108,186,675,000
5627.018	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	3,137	Sekolah	20,652,795,000
5627.019	Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013	8,012	Sekolah	16,414,405,000
5627.023	Sekolah Yang Mendapatkan Program Keterampilan/Kewirausahaan	204	Sekolah	22,425,900,000

3. Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
5627.002	Unit Sekolah Baru yang dibangun	18	Unit	61,615,116,000
5627.005	Ruang Kelas Baru yang dibangun	1,624	Ruang	409,395,890,000
5627.006	Ruang Belajar yang direhabilitasi	2,500	Paket	127,500,000,000
5627.007	Sekolah yang direnovasi	100	Paket	52,068,835,000
5627.008	Ruang Perpustakaan yang dibangun	750	Ruang	196,516,530,000
5627.009	Ruang Laboratorium yang dibangun	656	Ruang	184,877,194,000
5627.011	Ruang penunjang lainnya yang dibangun	221	Ruang	22,845,015,000
5627.018	Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	3,137	Sekolah	6,1172,499,000
5627.020	Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan	2,152	Paket	494,877,877,000

4. Sub Direktorat Peserta Didik

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
5627.001	Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar	1,367,559	Siswa	1,196,188,175,000
5627.014	Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5000	Siswa	43,889,792,000
5627.015	Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2,895	Siswa	10,577,040,000
5627.016	Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	3,346	Siswa	85,424,578,000
5627.022	Sekolah yang melaksanakan Program UKS	285	Sekolah	44,561,103,000

5. Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Uraian	Vol	Sat	Jumlah
5627.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	32	Layanan	4,732,109,000
5627.951	Layanan Internal (Overhead)	3	Layanan	3,084,743,000
5627.994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	26,736,659,000



SMA NEGERI 1 TELADAN
YOGYAKARTA



BAB IV

PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA TAHUN 2018

Dalam rangka mendukung tujuan strategis pembangunan pendidikan SMA 2015-2019, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun program-program untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Berikut ini adalah deskripsi program-program prioritas Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan tujuan strategis pembangunan pendidikan SMA 2015-2019.

A. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA adalah bantuan pendanaan pendidikan yang diberikan kepada seluruh SMA baik negeri maupun swasta. Program BOS SMA ditujukan untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah. melalui program BOS SMA ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Selain itu, program BOS SMA juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Adapun peruntukan dana BOS SMA Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru;
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler;
4. Pengelolaan Sekolah;
5. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
6. Langganan Daya dan Jasa;
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
8. Pembayaran Honor;
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran

Dana BOS yang diterima oleh sekolah diperhitungkan berdasarkan jumlah siswa yang ada pada sekolah yang bersangkutan. Adapun satuan biaya untuk BOS SMA adalah sebesar Rp.1.400.000/siswa/tahun. berdasarkan hal tersebut, maka besaran dana BOS di setiap sekolah dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah.

Dana BOS SMA dialokasikan melalui Dana Perimbangan, yakni melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Melalui mekanisme DAK Non Fisik, dana BOS SMA disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dalam hal ini Pemerintah Daerah. Kemudian dana BOS yang masuk dalam RKUD disalurkan secara langsung oleh Dinas Pendidikan provinsi kepada seluruh SMA penerima dana. Berdasarkan hal tersebut, maka proses penyaluran BOS SMA ini bersifat lintas instansi. Mekanisme penyaluran dana BOS SMA dari RKUN ke RKUD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penyaluran dana BOS dari RKUD ke SMA diatur penatausahaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun perananan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA, terkait dengan program BOS SMA adalah menetapkan norma pelaksanaan dana BOS di tingkat sekolah.

B. Pembangunan Sarana dan Prasarana Melalui DAK Fisik

Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik SMA selain dialokasikan secara terpusat, melalui Direktorat Pembinaan SMA, juga dialokasikan dalam mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui 33 (tiga puluh tiga) Provinsi (kecuali DKI Jakarta yang tidak mengusulkan). Pada Tahun 2018 ini pendidikan SMA mendapatkan alokasi DAK Fisik SMA reguler dan afirmasi. Untuk DAK Reguler pemerintah daerah dapat mengusulkan sekolah-sekolah yang akan menerima bantuan sebelum disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk DAK Fisik Afirmasi ditujukan untuk daerah-daerah tertinggal, terluar, dan terdepan secara geografis maupun ekonomi. Untuk DAK Afirmasi, daerah tetap mengusulkan sekolah-sekolah yang berada di wilayah yang ditentukan untuk diberikan bantuan. Adapun jenis bantuan DAK Fisik SMA adalah sebagai berikut:

1. DAK Fisik SMA Reguler:

- a. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal rusak sedang, berikut perabotnya (ruang);
- b. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya (ruang);
- c. Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya;
- d. Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya;
- e. Peralatan pendidikan (peralatan IPA);
- f. Sarana Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesenian dan/atau seni budaya;
- g. Media pembelajaran;
- h. Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.

2. DAK Fisik SMA Affirmasi:

- a. Pembangunan asrama siswa;
- b. Pembangunan rumah dinas/mess guru

Pelaksanaan DAK Fisik SMA ini juga dilaksanakan secara lintas instansi. Dana DAK Fisik SMA disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dalam hal ini Pemerintah Daerah. Kemudian dana DAK Fisik SMA yang masuk dalam RKUD disalurkan secara langsung oleh Dinas Pendidikan provinsi kepada seluruh SMA penerima, dalam hal ini adalah kepada Panitia Pelaksana Pembangunan Sekolah (P2S). Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara swakelola oleh P2S yang terdiri dari unsur sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Guru) dan masyarakat (Komite Sekolah dan unsur masyarakat lainnya).

C. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan peningkatan akses Pendidikan SMA yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun beberapa program untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut, yakni: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB); Program Indonesia Pintar (PIP) SMA. Berikut ini adalah deskripsi mengenai program-program tersebut.

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA

Unit Sekolah Baru (USB) adalah bantuan pembangunan unit gedung baru untuk penyelenggaraan sekolah SMA Negeri/Swasta yang diberikan kepada provinsi (USB Negeri) atau yayasan (USB Swasta) dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan SMA. Oleh karena itu, bantuan ini difokuskan bagi daerah yang memiliki Angka Partisipasi Pendidikan (APK) rendah, daerah terpencil, dan daerah yang tidak memiliki atau kekurangan fasilitas pendidikan. Untuk tahun 2018, Direktorat Pembinaan SMA akan mengalokasikan 18 USB dengan nilai Rp. 58.836.820.000,-

2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA

Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan masyarakat di suatu daerah. Bantuan RKB ini diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang memiliki daya tampung lebih kecil daripada jumlah siswa pendaftar. Selain itu bantuan ini juga diprioritaskan pada sekolah yang jumlah ruang kelas yang tersedia lebih sedikit daripada Rombongan Belajar yang ada. Selain itu, bantuan ini juga diperuntukan bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan mekanisme double shift. Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan RKB 1.624 ruang dengan dana Rp. 407.418.350.000

3. Siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) SMA

Salah satu upaya Direktorat Pembinaan SMA untuk menekan angka putus sekolah siswa SMA adalah dengan memberikan bantuan dana pendidikan kepada siswa untuk keperluan pribadinya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program PIP bertujuan untuk membantu siswa miskin dalam memenuhi biaya pribadinya selama menempuh pendidikan SMA. Program ini juga sekaligus memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada siswa kurang mampu untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMA. Program PIP adalah pemberian dana pendidikan secara langsung kepada siswa kurang mampu untuk memenuhi biaya pribadi peserta didik, meliputi: buku dan alat tulis sekolah; pakaian dan perlengkapan sekolah; transportasi siswa ke sekolah; dan uang saku siswa ke sekolah. Sasaran PIP pada tahun 2018 ini adalah sebanyak 1.367.559 siswa SMA dengan total alokasi dana sebesar Rp. 1.196.188.175.000,-. Biaya satuan (Unit Cost) untuk program ini adalah sebesar Rp 1.000.000 per siswa per tahun atau Rp. 500.000 per siswa per 6 bulan/semester.

D. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan SMA yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran pendidikan SMA yang berorientasi pada pembentukan karakter, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun beberapa program untuk mendukung pencapaian tujuan strategis tersebut, yakni: pembangunan sarana dan prasarana mutu pendidikan; rehabilitasi ruang belajar; pengadaan alat TIK; implementasi kurikulum 2013; dan lain-lain.

1. Pembangunan Ruang Laboratorium/Praktik Siswa

Mengingat pentingnya pemanfaatan teknologi komputer dan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran, ditambah keterbatasan fasilitas teknologi komputer dan laboratorium praktikum, maka pemerintah mencoba mengeliminasi keterbatasan tersebut dengan memberikan bantuan untuk pembangunan laboratorium. Program Laboratorium adalah bantuan penyediaan ruang laboratorium bagi sekolah yang belum memilikinya. Pada tahun 2018 Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 181.773.623.000 untuk 656 ruang laboratorium.

2. Ruang Belajar yang direhabilitasi

Kondisi sarana dan prasarana SMA saat ini masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk mencapai mutu sarana dan prasarana tersebut, Direktorat Pembinaan SMA memberikan bantuan Ruang Belajar yang direhabilitasi kepada sekolah dalam bentuk dana bantuan yang disalurkan langsung ke sekolah penerima. Pada tahun 2018 ini Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 124.932.170.000 untuk 2.500 paket rehabilitasi ruang belajar.

3. Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan

Sarana dan prasarana mutu yang cukup penting saat ini adalah peralatan komputer untuk pembelajaran. Hal ini menjadi penting, mengingat saat ini dunia sudah memasuki era teknologi informasi dan digital. Akses informasi yang berkembang saat ini harus dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan SMA. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 492.347.472.000,- untuk pengadaan 2.152 paket alat TIK. Bantuan ini diprioritaskan kepada sekolah yang belum memiliki alat TIK untuk pembelajaran.

4. Sekolah yang mendapatkan Perpustakaan atau pusat sumber belajar.

Berdasarkan Data Pokok SMA 2018, tercatat sebanyak 351 SMA belum memiliki fasilitas perpustakaan. Ruang perpustakaan merupakan salah satu prasarana yang cukup penting dalam pendidikan SMA. Dalam rangka memenuhi SNP terkait dengan sarana dan prasarana SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2018 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp.192.105.450.000, untuk pembangunan 750 ruang perpustakaan/pusat sumber belajar.

5. Sekolah yang direnovasi.

Program Renovasi Gedung SMA adalah bantuan untuk meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan SMA dan juga untuk membangun citra baru bangunan SMA yang tertata dan berpenampilan menarik. Melalui bantuan ini diharapkan sekolah-sekolah penerima bantuan ini menjadi icon ataupun kebanggaan dari daerahnya. Tahun 2018 ini Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp.50.600.000 000,- untuk 100 paket renovasi.

6. Siswa yang mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa.

Meningkatnya partisipasi pendidikan ternyata belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan ahlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Salah satu indikator terkait hal tersebut adalah dengan banyaknya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, seperti: penggunaan narkoba, HIV, Seks bebas, pornografi, tindak kekerasan di sekolah, paham radikal dan ekstrimisme. Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 43.889.792.000 meliputi beberapa kegiatan berikut:

a. Kawah Kepemimpinan Pelajar

Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) merupakan wahana bagi pengurus OSIS SMA untuk menggali, mengekspresikan, mengaktualisasikan jiwa kepemimpinan, karakter, keterampilan, dan pengetahuan pengelolaan organisasi. Dalam kegiatan ini siswa melakukan kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya, sekolah, maupun masyarakat dalam 5 (lima) kegiatan utama, yaitu Kepemimpinan, Kedisiplinan, Kebangsaan, Kreativitas, dan Kepedulian.

Peserta KKP tingkat nasional adalah hasil seleksi dari tingkat Kabupaten/ Kota dan Provinsi, untuk seleksi tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2018 dari hasil seleksi tingkat provinsi mengirim 8 perwakilan ke tingkat nasional dengan komposisi 4 (empat) putra dan 4 (empat) putri yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-28 April 2018 di Cibubur.

b. Kemah Penguatan Pendidikan Karakter (KEPAK).

Kemah Penguatan Pendidikan Karakter (KEPAK) adalah wahana kegiatan bagi siswa SMA yang aktif dalam kegiatan kesiswaan, antara lain meliputi Kepramukaan, Paskibra, PMR, dan KIR. Peserta KEPAK tingkat nasional adalah hasil seleksi dari tingkat Kabupaten/Kota pada bulan Juli 2018, seleksi Provinsi pada bulan Juli – September 2018 dan untuk tingkat nasional dilaksanakan pada tanggal 7-12 Oktober 2018.

c. Bantuan Pemerintah untuk Program Pendidikan Karakter

Bantuan Pemerintah Untuk Program Pendidikan Karakter merupakan bantuan yang bertujuan untuk memotivasi atau memantik sekolah atau lembaga untuk meningkatkan pendidikan karakter kepada siswa. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp 25,000,000, dana ini digunakan untuk melakukan kegiatan seperti seminar, pelatihan atau kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan pendidikan karakter.

d. Program Pembelajaran Kepemimpinan dan Budaya Antar Negara: Program ini meliputi:

- Singapore Indonesia Student Leaders Adventure Camp (SISLAC).
Penyelenggaraan kegiatan ini adalah kerja sama antara kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Singapura, kegiatan ini diikuti oleh siswa dari kedua negara, Indonesia dan Singapura.
- Sakura Exchange Program In Science
Kegiatan diikuti lebih dari 30 negara dari berbagai benua, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kemajuan science dan tradisi budaya di negara Jepang.
- Asian Youth Leader (AYL)
Program ini bertujuan untuk mengenalkan budaya dari berbagai negara asia dan penyelenggaraan kegiatan ini akan berpindah pada setiap tahunnya.
- Sunburst Youth Camp (SYC)
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan budaya antar negara peserta dan menyiapkan pemimpin untuk masa depan.

7. Sekolah yang melakukan kerja sama dengan Satuan Pendidikan Kerja Sama

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017 mencanangkan Program Kerja sama antara Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). SPK sebagai pengguna kurikulum negara lain atau kurikulum internasional pada umumnya memiliki tingkat pemenuhan standar tinggi yang diakui secara internasional serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global. Dengan memiliki keunggulan tersebut, dipandang perlu adanya kerja sama yang sinergis antara SMA dan SPK untuk berbagi sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan. 122 SMA dan 122 SPK diundang dengan harapan mereka akan saling mendapatkan manfaat, diantaranya:

a. Sekolah

Manfaat yang didapat dari kegiatan ini bagi sekolah adalah adanya peningkatan mutu kelembagaan sekolah yang dapat diimplementasikan untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi peserta didik

b. Direktorat Pembinaan SMA

Direktorat Pembinaan SMA dapat memiliki data base profil sekolah SPK yang bermanfaat bagi dasar pengambilan kebijakan tentang penguatan mutu kelembagaan sekolah dan sebagai upaya intervensi kebijakan pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat

c. SPK

Memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dalam turut serta berkontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan SMA di seluruh Indonesia

Selain manfaat di atas Sekolah yang melakukan kerja sama dengan Satuan Pendidikan Kerja Sama yaitu untuk pencapaian visi masing-masing. Hasil dari kegiatan ini adalah 48 nota kesepahaman (MoU).

Tahun 2018, Direktorat Pembinaan SMA akan melaksanakan supervisi untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta kemajuan yang dibuat oleh SMA dan SPK dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati.

8. Sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013

Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Perdagangan bebas (baik pada tingkat regional maupun internasional) memberikan tantangan bagi Bangsa Indonesia untuk dapat bersaing. Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini berimplikasi pada terjadinya kecenderungan konvergensi antara ilmu dengan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Indonesia mutlak diperlukan untuk dapat bersaing di era globalisasi. Dalam rangka implementasi kurikulum 2013 dan meningkatkan mutu pembelajaran di SMA. Kebijakan Direktorat Pembinaan SMA melaksanakan Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran SMA.

Padat ahun 2017 sebagaimana roadmap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sasaran sekolah pelaksana Kurikulum 2013 adalah sebesar 25% secara nasional atau 3.212 SMA di 514 Kabupaten/Kota 34 provinsi, sedangkan untuk tahun 2018 sasaran sekolah pelaksana Kurikulum 2013 bertambah menjadi sebesar 60% secara nasional di 514 kabupaten/kota 34 provinsi. Sejalan dengan perkembangan kebijakan pelaksanaan kurikulum 2013, Pada tahun 2018 ini, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16,414,405.000 dengan sasaran 8.012 sekolah. Agenda terkait dengan implementasi kurikulum 2013 adalah: Penyiapan perangkat pendukung pelaksanaan kurikulum 2013; Pendampingan Implementasi kurikulum 2013; Pelatihan kurikulum 2013 tahun 2018; pemantauan Siswa SMA yang memenuhi standar kelulusan; dan Pengembangan sekolah yang melaksanakan sistem kredit semester.

Arah kebijakan pada tahun 2018 sejalan dengan reorganisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pelaksanaan pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Direktorat Pembinaan SMA, juga melibatkan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LMPM) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di 34 Propinsi.

9. SMA yang dibina menjadi sekolah Rujukan

SMA rujukan merupakan sekolah yang telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, mengembangkan praktek terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi baik akademik maupun non akademik serta melaksanakan program kebijakan pendidikan yang layak menjadi rujukan SMA lain.

SMA Rujukan dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong upaya sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan guna peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerjasama antara sekolah rujukan dengan sekolahmitranya. Sekolah rujukan memiliki indikator berakreditasi A; mengembangkan budaya mutu; menjadi pusat keunggulan; dan lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan aman. Pada tahun 2018 ini, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 108.186.675.000,- dengan sasaran 650 sekolah. .

10. Sekolah yang mendapatkan keterampilan dan Kewirausahaan

Sekolah Kewirausahaan adalah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif serta mengembangkan praktik-praktik baik dengan melakukan inovasi pada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Pada tahun 2018 ini, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 22.425.900.000,- Kegiatan Sekolah kewirausahaan terdiri 204 SMA yang menerapkan program kewirausahaan.

11. Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi

Sebagai bentuk penghargaan bagi siswa berprestasi dan berbakat akan diberikan beasiswa kepada siswa-siswi pemenang dan peserta yang lolos ke tingkat nasional Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Inggris, OSN, O2SN, FL2SN, OPSI, FIKSI, ARKI, selain tingkat nasional Beasiswa juga diberikan kepada para peserta yang mengikuti lomba tingkat internasional. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan bagi siswa berprestasi. Implementasi pelaksanaan program ini dilakukan melalui pemberian beasiswa prestasi kepada 2,895 siswa SMA dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.577.040.000

12. Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan Olimpiade

Berbagai lomba dan kegiatan baik keilmuan (sains), olah raga, seni yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA bertujuan untuk menumbuhkan semangat kompetisi dan sportifitas dari siswa SMA. Berikut ini adalah penjelasan secara detail setiap olimpiade maupun lomba peserta didik SMA Tahun 2018 dengan alokasi anggaran Rp.85,424,578,000 - diikuti sebanyak 3.346 siswa.

12.1. Olimpiade Sains Nasional

Olimpiade Sains merupakan ajang kompetisi siswa di bidang Sains, OSN dibagi menjadi 9 bidang ilmu yang dilombakan : matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, informatika, ekonomi, geografi, dan kebumihantaran. Peserta OSN tingkat nasional merupakan hasil seleksi mulai dari tingkat sekolah, tingkat Kabupaten/Kota (Olimpiade Sains tingkat Kabupaten/Kota), tingkat Provinsi (Olimpiade Sains tingkat Provinsi). Tahapan Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional tahun 2018 akan dimulai dari seleksi Olimpiade Sains tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 28 Februari 2018, lalu seleksi Olimpiade Sains tingkat Provinsi pada tanggal 10-12 April 2018 dan untuk pelaksanaan tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 1-7 Juli di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.1. Tahapan OSN

Tahapan	Tanggal	Tempat
Olimpiade Sains Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	28 Februari 2018	Seluruh Kabupaten/Kota
Olimpiade Sains Seleksi Tingkat Provinsi	10-12 April 2018	34 Provinsi
Olimpiade Sains Nasional	1-7 Juli 2018	Padang, Sumatera Barat

30 Peserta terbaik masing-masing bidang kecuali Ekonomi dari OSN tingkat nasional akan di bina kembali dan dipilih 5 peserta terbaik sesuai hasil pembinaan untuk mengikuti Olimpiade Internasional pada tahun berikutnya.

Tabel 4.2. Olimpiade Sains Internasional

Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat
International Mathematical Olympiad (IMO)	3-14 Juli 2018	Cluj-Navoca, Romania
International Biology Olympiad (IBO)	15-22 Juli 2018	Tehran, Iran
International Chemistry Olympiad (IChO)	19-29 Juli 2018	Slovakia & Czech Republic

Nama Kegiatan	Tanggal	Tempat
International Physics Olympiad (IPhO)	21-29 Juli 2018	Lisbon, Portugal
International Geography Olympiad (IGeO)	31 Juli 7 Agustus 2018	Kanada
International Earth Science Olympiad (IESO)	8-17 Agustus 2018	Kanchanaburi, Thailand
International Olympiad in Informatics (IOI)	1-8 September 2018	Tsukuba, Ibaraki, Japan
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)	-	-

12.2. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional adalah lomba/kompetisi untuk mewadahi Peserta Didik yang berbakat dalam bidang olahraga. Pada tahun 2018 ini, O2SN akan mempertandingkan 5 (lima) cabang olahraga, yaitu: Atletik, Bulu Tangkis, Pencak Silat, Karate, Renang. Peserta O2SN tingkat nasional adalah hasil dari seleksi tingkat sekolah, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pelaksanaan seleksi tingkat Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada 17-21 April 2018, Seleksi tingkat Provinsi pada tanggal 6-10 Mei 2018 dan pelaksanaan tingkat nasional pada tanggal 16-22 September 2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus Bidang karate, hasil dari O2SN akan diberikan pelatihan kembali untuk mengikuti kejuaraan karate internasional pada tahun berikutnya.

12.3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) adalah lomba untuk peserta didik yang berbakat dalam bidang seni. Bidang lomba FLS2N 2018 berjumlah 9 bidang yang dibagi menjadi dua, yaitu Seni Pertunjukan dan Seni Penciptaan. Seni Pertunjukan meliputi 5 bidang yaitu ; Baca Puisi, Tari Kreasi, Vokal Solo, Gitar Solo dan Teater Monolog. Untuk Seni Penciptaan meliputi 4 Bidang; Cipta Puisi, Desain Poster, Kriya dan Film Pendek.

Seleksi FLS2N pada tingkat provinsi bisa dilakukan dengan dua acara, seleksi secara langsung dan dalam jaringan (online). Untuk seleksi daring tingkat Provinsi dilakukan melalui laman <http://psma.kemdikbud.go.id/> mulai tanggal 2 Mei dan berakhir tanggal 30 Juni 2018 dan penilaian akan dilakukan tanggal 1-20 Juli 2018. Untuk pelaksanaan tingkat nasional akan diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus – 1 September 2018 di Provinsi Aceh.

12.4. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

Tujuan diselenggarakannya OPSI adalah sebagai wadah bagi para peserta didik SMA untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dalam meneliti dan berinovasi, serta menumbuhkembangkan budaya meneliti di kalangan siswa SMA. Bidang ilmu yang dilombakan dalam OPSI dikelompokkan menjadi tiga bidang, 1). Matematika, Sains dan Teknologi, 2). Fisika Terapan dan Rekayasa, 3). Ilmu Sosial dan Humaniora.

Tahapan seleksi OPSI seluruhnya dilakukan dalam jaringan (daring) atau online, mulai dari pengiriman proposal penelitian dengan cara mengunggah proposal penelitian, Dimulai pada tanggal 15 Januari hingga 17 maret 2018. Lalu pengunggahan hasil abstrak, laporan, hasil penelitian, logbook serta video profil penelitian bagi peserta yang lolos dari tahapan sebelumnya tersebut tanggal 1 – 12 Agustus 2018 pada laman: <http://olimpiade.psma.kemdikbud.go.id>. Untuk pelaksanaan OPSI tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 Oktober 2018 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Tabel 4.3. Tahapan OPSI SMA 2018

Kegiatan	Tanggal	Keterangan
Pengunggahan Proposal Penelitian	15 Januari 2018 - 17 Maret 2018	Melalui Daring : http://olimpiade.pasma.kemdikbud.go.id
Seleksi dan Pengumuman Proposal Penelitian	13 – 15 April 2018	Melalui Daring
Pengunggahan Abstrak, Laporan Hasil Penelitian, <i>Logbook</i> , dan Video Profil Penelitian	1 – 12 Agustus 2018	Melalui Daring : http://olimpiade.pasma.kemdikbud.go.id
Pengumuman Peserta Final OPSI 2018	10 September September 2018	Via surat, dan laman http://olimpiade.pasma.kemdikbud.go.id
Pelaksanaan OPSI	15 – 20 Oktober 2018	Semarang

Untuk hasil penelitian terbaik dari OPSI akan diberikan pembinaan kembali untuk mengikuti ajang lomba penelitian tingkat internasional pada tahun berikutnya.

12.5. Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan National Schools Debating Championship (NSDC)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemikiran analitik siswa dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat, membangun rasa percaya diri, serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ajang debat ini akan membicarakan isu-isu hangat mengenai perkembangan kondisi nasional maupun internasional yang terjadi. Lomba Debat ini akan dipertandingkan didalam dua ajang yang berbeda, yakni Lomba Debat dalam Bahasa Indonesia (LDBI) dan National Schools Debating Championship (NSDC).

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 12 Agustus 2018 di Kota Bengkulu. Hasil dari NSDC tingkat nasional akan di lakukan pembinaan kembali untuk mewakili Indonesia di World School Debating Championship (Lomba Debat Bahasa Inggris) pada tahun berikutnya.

12.6. Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI)

FIKSI dimaksudkan untuk memfasilitasi para siswa SMA yang mempunyai minat dan bakat berwirausaha dan memulai usaha dengan basis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. FIKSI dibagi menjadi 6 kategori yaitu: Bidang Kerajinan, Desain Grafis, Fashion, Digital Game, Boga dan Bidang Usaha lainnya.

Tahapan proses pendaftaran proposal rencana bisnis FIKSI di mulai pada awal bulan Mei 2018 melalui portal FIKSI dengan alamat:<http://olimpiade.p sma.kemdikbud.go.id>.

Tabel 4.4. Jadwal FIKSI SMA 2018

Kegiatan	Tanggal	Keterangan
Pendaftaran Proposal rencana usaha	Awal Mei 2018	Melalui portal FIKSI pada laman: http://olimpiade.p sma.kemdikbud.go.id
Pengumuman Finalis FIKSI 2018	Minggu ke 3 Agustus 2018	melalui surat dan laman: http://olimpiade.p sma.kemdikbud.go.id
Pelaksanaan FIKSI 2018	1-6 Oktober 2018	Daerah Istimewa Yogyakarta

12.7. Gebyar Literasi Sekolah (GLS)/ Akademi Remaja Kreatif Indonesia (ARKI)

Latar belakang diselenggarakannya Gebyar Literasi Sekolah/ARKI adalah sebagai salah satu proses pembentukan karakter.GLS tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mahir berkesenian tetapi dilatih pula untuk memiliki kepekaan afektif, estetis, guna memperkuat rasa percaya diri melalui kesenian sebagai media ekspresi.

ARKI merupakan bagian dari rangkaian GLS dengan tiga bidang perlombaan yaitu: Cipta Syair, Cipta Cerita Pendek dan Cipta Komik. Proses seleksi dan penyelenggaraan ARKI bekerja sama dengan PT. Mizan Pustaka. Untuk 2018 akan diselenggarakan pada tanggal 26 – 31 Oktober 2018 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sekolah dan peserta didik tentang lingkungan yang sehat. Kegiatan sosialisai ini sekaligus penilaian dari lomba sekolah sehat tingkat nasional yang bekerja sama antar lembaga kementerian.

14. Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen berbasis Sekolah.

Sekolah yang mendapatkan pembinaan manajemen berbasis sekolah. Kebijakan program ini memenuhi standar nasional Pendidikan. Berikut ini adalah daftar tempat penyelenggaraan lomba tingkat internasional. Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20.652.000,- sasaran sekolah yang mendapatkan pembinaan manajemen berbasis sekolah sebanyak 3.137 sekolah.

E. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, Direktorat Pembinaan SMA menyusun beberapa program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, yakni: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, Dokumen; Evaluasi dan Pelaporan Program Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018; Kerjasama dan Sinergi Antar Lembaga; dan Program Pengembangan Kelembagaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai program-program tersebut secara detail.

1. Layanan Manajemen Program.

Dalam penyusunan program dan anggaran, Direktorat Pembinaan SMA kerap harus berkoordinasi dengan unsur-unsur lain yang berkepentingan dan saling berhubungan. Proses perencanaan program dalam hal ini pembangunan pendidikan SMA berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan melibatkan instansi/ Kementerian lainnya dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi tersebut adalah Bappenas, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan dan diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan DPR dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah penyusunan perencanaan program/kegiatan pembinaan SMA untuk tahun 2018 baik di pusat maupun provinsi.

2. Layanan Manajemen Evaluasi

Keberhasilan suatu program akan sangat bergantung dari kualitas perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu untuk memenuhi target tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan, kegiatan monitoring dan evaluasi program perlu dilaksanakan. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. Ruang lingkup pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi program-program yang dilakukan di tingkat (a) pusat (direktorat Pembinaan SMA) dan (b) di tingkat provinsi (dinas pendidikan) sebagai pelaksana teknis dana dekonsentrasi. Pada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia. Strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini meliputi kegiatan evaluasi laporan kegiatan bulanan provinsi, juga evaluasi langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan maupun hasil pelaksanaan program. Kebijakan dan Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan Manajemen dan Teknis bagi satuan kerja Direktorat Pembinaan SMA. Sasaran program ini mencakup pelaksanaan pemantauan pelaksanaan dan pencapaian seluruh hasil program.

F. Rekapitulasi Program Prioritas Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018

No	Subdit	Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Jumlah
1	Peserta Didik	Program Indonesia Pintar	1.367.559	Siswa	1.196.188.175.000
2	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Unit Sekolah Baru	18	Unit	58.836.820.000
3	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Ruang Kelas Baru	1.624	Ruang	407.418.350.000
4	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Rehabilitasi Ruang Belajar	2.500	Ruang	124.932.170.000
5	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Renovasi Sekolah	100	Sekolah	50.600.000.000
6	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Perpustakaan	750	Ruang	192.105.450.000
7	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Laboratorium	656	Ruang	181.773.623.000
8	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Ruang penunjang lain	221	Ruang	22.317.995.000
9	Kurikulum	Kewirausahaan	204	Sekolah	22.425.900.000
10	Kelembagaan, Sarana Prasarana	Peralatan pendidikan	2.152	Paket	492.347.472.000
11	Kurikulum	Manajemen Berbasis Sekolah	3,137	Sekolah	20.652.795.000
12	Kurikulum	Pelaksanaan Kurikulum 2013	8,012	Sekolah	16.414.405.000
13	Kurikulum	Sekolah Rujukan	650	Sekolah	108.186.675.000
14	Peserta Didik	Sosialisasi Program UKS	285	Sekolah	445.611.000
15	Peserta Didik	Beasiswa Bakat dan Berprestasi	2,895	Siswa	10,577,040,000
16	Peserta Didik	Siswa mengikuti lomba, festival, dan olimpiade	3,346	Siswa	85.424.578.000

G. Deskripsi Program Bantuan Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2018

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMA APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMA
2. TUJUAN :
 1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai 21 (duapuluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/ Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;
 2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
 3. Menarik siswa putus sekolah (*drop put*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan disekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/ satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).
3. SASARAN : 1.367, 559 Siswa dengan alokasi anggaran Rp.1.196.188.175.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Meningkatkan akses pendidikan
5. PENERIMA MANFAAT : Siswa
6. PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN : Sekolah mengentri (*updating*) data siswa (nomor KPS/KKS/KIP) calon penerima PIP 2018 dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Pemegang KPS;
 2. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP;
 3. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
 4. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
 5. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
 6. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kompleks Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: kip.sma@kemdikbud.go.id
Hotline : 021-75912056, 0812-8538-0515

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
2. TUJUAN :
 1. Mendukung Program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
 4. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Atas di daerah yang membutuhkan;
3. SASARAN : 18 unit sekolah dengan nilai bantuan; nilai bantuan Rp. 58.836.820.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Membangun unit sekolah baru
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Masyarakat;
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan;
 2. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 3. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola dikerjakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemeliharaan USB;
 4. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang langsung ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan Provinsi atau Yayasan Pendidikan.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Diprioritaskan pada Kabupaten/kota yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah
 2. Daya dukung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTS;
 3. Menyediakan lahan siap bangun atas nama pemerintah daerah (Pemda) +/- (kurang

lebih) 10.000m², (menyatu dan tidak terpisah-pisah) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (aktejual beli, hibah, peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kondisi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak berdekatan dengan SMA/MAN/SMK, kecuali untuk daerah-daerah padat.
 - b. Lahan/site USB memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terletak disekitar pemukiman penduduk;
 - 2) Mudah dijangkau, tersedia jalan masuk yang memadai;
 - 3) Bebas dari gangguan suara, bau dan keramaian
 - 4) Penyediaan jaringan listrik dan jaringan komunikasi.
 - 5) Tersedia sumber air bersih, tetapi tidak berada di daerah aliran sungai (DAS);
 - 6) Kontur tanah relatif datar dan tidak berbukit;
 - 7) Bebas dari pengaruh jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 8) Bebas dari banjir, genangan air, rawa dan potensi tanah longsor;
 - 9) Tidak termasuk wilayah konservasi.
4. Menjamin lahan/tanah tidak dalam sengketa, apabila dikemudian hari terjadi masalah terhadap lahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab provinsi;
 5. Jika status lahan belum sertifikat, wajib mengurus status kepemilikan lahan USB menjadi sertifikat atas nama hak milik pemerintah daerah;
 6. Menjamin tidak akan memindahkan /mengalihkan lokasi USB yang sudah diverifikasi ke lokasi lainnya dan apabila karena sesuatu hal terpaksa dilakukan pengalihan maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi, dan harus melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan, serta menginformasikannya kepada Direktorat Pembinaan. SMA.

8. Sanggup menyediakan dana pendukung, biaya tenaga teknis perencana dan pengawas, dana operasional, dan input pendidikan;
9. Mengajukan proposal kepada Direktorat Pembinaan SMA;

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
 PO. BOX 1131-JKS-12011
 email: subdit.sarana.p sma@kemdikbud.go.id
 cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
 Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU
SMA APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : RUANG KELAS BARU (RKB) SMA
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
 4. Menambah ruang kelas baru bagi SMA dengan jumlah siswa yang cenderung meningkat, melebihi daya tampung.
3. SASARAN : 1.624 kelas Ruang Kelas Tidak Bertingkat; nilai bantuan Rp. 407.418.350.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Menambah akses/daya tampung sekolah.
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 3. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk dana hibah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak sekolah.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN :
 1. Memiliki lahan/tanah milik Pemerintah Daerah (bagi SMA Negeri) atau milik Yayasan (bagi SMA Swasta), dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat, atau
 - b. Proses sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau
 - c. Akta jual beli/akta hibah/hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari kecamatan.

2. Berpotensi untuk dikembangkan, ditunjukkan dengan kepemilikan 3 (tiga) rombongan belajar dengan jumlah siswa stabil atau meningkat dari tahun ke tahun;
3. Diprioritaskan pada SMA dengan kondisi:
 - a. Rombongan Belajar lebih banyak daripada jumlah ruang kelas;
 - b. Jumlah pendaftar siswa baru lebih besar dari daya tampung sekolah;
 - c. Jumlah siswa lebih dari 40 orang per kelas;
 - d. Masih melaksanakan sistem pembelajaran *double-shift*;
 - e. Memiliki analisis kebutuhan Ruang Kelas Baru;
 - f. Telah mengisi dapodikmen secara online: <http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>;
 - g. Memiliki ijin pendirian sekolah (bagi SMA Negeri), dan akte pendirian yayasan dan ijin operasional sekolah (bagi SMA Swasta);
 - h. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - i. Memiliki kepala sekolah definitif, dibuktikan dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (bagi SMA Negeri) atau surat keputusan yayasan (bagi SMA Swasta);
 - j. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah tahun sebelumnya dan tidak mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya;
 - k. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
 - l. Memiliki site plan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
 PO. BOX 1131-JKS-12011
 email: subdit.sarana.p sma@kemdikbud.go.id
 cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
 Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SMA APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : REHABILITASI RUANG BELAJAR SMA
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan **Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)** dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
 4. Mengembalikan kelayakan fungsi ruang belajar.
3. SASARAN : 2.500 Ruang; nilai bantuan Rp. 124.932.170.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Mengembalikan fungsi kelayakan bangunan.
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan secara swakelola, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 3. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk dana hibah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak sekolah.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Memiliki lahan/tanah milik Pemerintah Daerah (bagi SMA Negeri) atau milik Yayasan (bagi SMA Swasta), dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat,
 - b. Proses sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
 - c. Akta jual beli/akta hibah/hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari kecamatan.

2. Bangunan ruang belajar yang memerlukan rehabilitasi fisik bangunan.
3. Memiliki analisa tingkat kerusakan yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Telah mengisidapodikmen secara online: <http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id>;
5. Memiliki ijin pendirian sekolah (bagi SMA Negeri), dan akte pendirian yayasan dan ijin operasional sekolah (bagi SMA Swasta);
6. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
7. Memiliki kepala sekolah definitif, dibuktikan dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi (bagi SMA Negeri) atau surat keputusan yayasan (bagi SMA Swasta);
8. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah tahun sebelumnya dan tidak mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya;
9. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
 PO. BOX 1131-JKS-12011
 email: subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id
 cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
 Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI (RENOVASI) BANGUNAN SMA APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : RENOVASI BANGUNAN SMA
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Meningkatkan kualitas dan kondisi fisik bangunan, SMA sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai prasarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
 4. Terpuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dari prasyarat teknis bangunan, oleh pengguna dan pengelola bangunan SMA.
 5. Membangun citra baru bangunan SMA yang tertata dan berpenampilan baik , tidak kusam dan biasa.
3. SASARAN : 100 Paket renovasi bangunan SMA; nilai bantuan Rp. 50.600.000.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Merenovasi bangunan sekolah.
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pembangunan dilaksanakan secara swakeloladikerjakan oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pelaksana pembangunan;
 3. Bantuan diberikan dalam bentuk dana yang langsung ditrasfer ke rekening sekolah untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan renovasi bangunan.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN :
 1. Diprioritaskan pada SMA yang memiliki kondisi, diantaranya:
 - a. Bangunan SMA lebih dari 20 tahun;
 - b. Sasaran bangunan yang direnovasi adalah perwajahan bagian depan sekolah;
 - c. Sebagian besar kondisi bangunan lama, sudah tidak layakfungsisehingga

dapat membahayakan atau mengganggu ketenangan dalam proses belajar mengajar.

- d. Mengalami musibah (kebakaran, bangunan runtuh, kerusakan, dll) atau bencana alam (rob, gempa, banjir, longsor, dll).
1. Diutamakan bagi sekolah yang memiliki kemampuan dan komitmen internal dalam bentuk dana sharing (imbal swadaya), untuk menyelesaikan lingkup pekerjaan revitalisasi yang telah direncanakan;
2. Memiliki dokumen *master plan* dan *site plan* sebagai rencana pengembangan sekolah jangka panjang;
3. Renovasi bangunan diarahkan pada sebagian atau keseluruhan dari bangunan lama yang akan dipugar atau dibongkar, dan selanjutnya dibangun kembali dengan tampilan dan disain bangunan baru sesuai dengan *site plan* sekolah;
4. Bangunan sekolah yang masuk kategori cagar budaya, tidak diperkenankan menjadi sasaran bangunan yang akan direvitalisasi;
5. Melakukan proses pengurusan penghapusan aset, khususnya pada sasaran bangunan renovasi yang sudah tidak mendukung fungsi bangunan yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan pengembangan sekolah;
6. Untuk bangunan sekolah yang harus melakukan proses penghapusan, maka pelaksanaan renovasi bangunan baru dapat dilaksanakan setelah surat persetujuan atau surat konfirmasi proses penghapusan aset dikeluarkan oleh pejabat daerah yang berwenang dan diterima oleh pihak sekolah, serta selanjutnya ditembuskan kepada Direktorat PSMA;
7. Kategorisasi lingkup renovasi bangunan sekolah:
 - a. Kategori I, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:
Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali.
 - b. Kategori II, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:
Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali. Terjadinya penambahan kapasitas dan jenis fungsi ruang.
 - c. Kategori III, dengan kondisi lingkup renovasi mencakup:

Mengembalikan fungsi ruang sehingga layak digunakan kembali. Penambahan kapasitas dan jenis fungsi ruang, serta perubahan alokasi fungsi ruang.

8. Bangunan yang akan direnovasi berada di atas tanah yang memiliki kejelasan status sebagai hak milik sekolah, yang diperkuat dengan penyertaan sertifikat hak milik dan/atau akta jual beli (sertifikasi sedang dalam proses);
9. Bantuan rebovasi tidak diperuntukkan untuk pembangunan bangunan baru;
10. Sanggup menyediakan dana sharing dari nilai RAB renovasi yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktorat Pembinaan SMA;
11. Pencapaian kualitatif yang harus dipenuhi dari bangunan yang telah direnovasi adalah:
 - Peningkatan nilai fungsi bangunan.
 - Disain dan tata letak bangunan yang baru.
 - Bangunan dipugar dan dibangun baru.
 - Kapasitas bangunan yang baru.
12. Sekolah telah mengisi data online dengan alamat <http://pendataan.dikmen.kemendikbud.go.id>, dibuktikan dengan dilampirkannya no NSPN untuk sekolah yang bersangkutan;
13. Memiliki ijin pendirian sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
14. Memiliki Kepala Sekolah definitif, dibuktikan dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
15. Tidak termasuk sekolah yang belum menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan sosial atau mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya;
16. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
 Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
 PO. BOX 1131-JKS-12011
 email: subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id
 cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
 Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SMA

APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SMA
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
 4. Memenuhi standar ketersediaan ruang perpustakaan pada setiap layanan SMA .
3. SASARAN : 750 Ruang; nilai bantuan Rp.192.105.450.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi ketersediaan ruang belajar.
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 4. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk dana hibah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak sekolah.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Memiliki lahan/tanah milik pemerintah daerah (bagi SMA Negeri) atau milik yayasan (bagi SMA Swasta), dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat; atau
 - b. Proses sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
 - c. Akta jual beli/akta hibah/hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari Kecamatan.
 2. Diprioritaskan bagi sekolah yang belum mempunyai perpustakaan;

3. Memiliki analisis kebutuhan perpustakaan;
4. Telah mengisi dapodikmen secara online,alamat:
<http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id>;
5. Memiliki Ijin Pendirian Sekolah (bagi SMA Negeri), dan Akte Pendirian Yayasan dan Ijin Operasional Sekolah (bagi SMA Swasta);
6. Memiliki kepala sekolah definitif, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota(bagi SMA Negeri) atau Surat Keputusan Yayasan (bagi SMA Swasta);
7. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun sebelumnya dan tidak mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan pemerintah SMA sebelumnya;
8. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
9. Memiliki *Site Plan* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Perpustakaan SMA.

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.sarana.p sma@kemdikbud.go.id
cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PEMERINTAH LABORATORIUM/PRAKTEK SISWA

APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : PEMBANGUNAN RUANG
LABORATORIUM/PRAKTIK SISWA
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
 4. Menambah ruang Laboratorium SMA yang belum memiliki laboratorium
3. SASARAN : 656 Ruang; nilai bantuan Rp. 181.773.623.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi kebutuhan ruang laboratorium.
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 3. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk dana hibah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak sekolah.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Memiliki lahan/tanah milik pemerintah daerah (bagi SMA Negeri) atau milik yayasan (bagi SMA Swasta), dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikat; atau
 - b. Proses sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
 - c. Akta jual beli/akta hibah/hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari Kecamatan.

2. Telah mengisi dapodikmen secara online,alamat:
<http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id>;
3. Memiliki Ijin Pendirian Sekolah (SMA Negeri), dan Akte Pendirian Yayasan dan Ijin Operasional Sekolah (SMA Swasta);
4. Memiliki kepala sekolah definitif, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota(bagi SMA Negeri) atau Surat Keputusan Yayasan (bagi SMA Swasta);
5. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun sebelumnya

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id
cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
Hotline: 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH PENUNJANG LAIN APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : PEMBANGUNAN RUANG PENUNJANG LAIN
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
 4. Meningkatkan kualitas dan kondisi lingkungan SMA sehingga dapat dipenuhinya lingkungan sekolah yang tertib, bersih, sehat, dan nyaman;
 5. Memenuhi ketersediaan standar fungsi ruang dan membangun citra baru lingkungan SMA yang tertata dan berpenampilan baik.
3. SASARAN : 221 Ruang; nilai bantuan Rp. 22.317.995.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi kebutuhan ruang penunjang.
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Kewenangan penetapan penerima bantuan dana oleh Direktorat Pembinaan SMA;
 2. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola, dikerjakan oleh sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 3. Bantuan diberikan langsung ke rekening sekolah dalam bentuk dana hibah yang dikelola dan menjadi tanggungjawab mutlak sekolah.
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Memiliki lahan/tanah milik pemerintah daerah (bagi SMA Negeri) atau milik yayasan (bagi SMA Swasta), dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat; atau
 - b. Proses sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN),
 - c. Akta jual beli/akta hibah/hak guna bangunan disertai surat keterangan bukan tanah sengketa dari Kecamatan.
1. Telah mengisi dapodikmen secara online,alamat:
<http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id>;
 2. Memiliki Ijin Pendirian Sekolah (SMA Negeri), dan Akte Pendirian Yayasan dan Ijin Operasional Sekolah (SMA Swasta);
 3. Memiliki kepala sekolah definitif, dibuktikan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota(bagi SMA Negeri) atau Surat Keputusan Yayasan (bagi SMA Swasta);
 4. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah SMA tahun sebelumnya dan tidak mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan pemerintah SMA sebelumnya;

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.sarana.psma@kemdikbud.go.id
cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PEMERINTAH PERALATAN PENDIDIKAN (T.I.K) SMA APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : PERALATAN PENDIDIKAN SMA
2. TUJUAN :
 1. Mendukung program Pendidikan Menengah Universal dalam meningkatkan ketersediaan layanan SMA;
 2. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
 4. Menyediakan dan menambah ketersediaan peralatan komputer pembelajaran SMA.
3. SASARAN : 2.152 Paket untuk peralatan TIK; nilai bantuan Rp. 492.347.472.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi kebutuhan alat penunjang pembelajaran
5. PENERIMA MANFAAT :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. SMA penerima bantuan;
 3. Masyarakat.
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Memiliki ijin pendirian sekolah (bagi SMA Negeri), dan akte pendirian yayasan dan ijin operasional sekolah (bagi SMA Swasta);
 2. Memiliki kepala sekolah definitif, dibuktikan dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi (bagi SMA Negeri) atau surat keputusan yayasan (bagi SMA Swasta);
 3. Telah menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan pemerintah tahun sebelumnya dan tidak mempunyai masalah dalam pengelolaan bantuan sosial sebelumnya;
 4. Memiliki komite sekolah, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
7. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.sarana.psm@kemdikbud.go.id
cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SEKOLAH KEWIRAUSAHAAN

APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : SEKOLAH KEWIRAUSAHAAN
2. TUJUAN :
 1. Mendorong upaya sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Menumbuhkembangkan praktik-praktik baik dan inovasi kegiatan;
 3. Memperluas dan mempercepat ketersediaan layanan pendidikan pengembangan program Kewirausahaan di SMA
 4. Memberdayakan sekolah sebagai pelopor dan pengembang praktik-praktik baik pengembangan program kewirausahaan sebagai rujukan bagi SMA lain;
 5. Memperkuat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA dengan cara mengembangkan metode pembelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan nilai-nilai kewirausahaan pada kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah;
 6. Merumuskan rancangan program kewirausahaan dan pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan pada kegiatan ekstra dan intrakurikuler
3. SASARAN : 204 Sekolah Kewirausahaan Rp.22.425.900.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Meningkatkan mutu pendidikan SMA
5. PENERIMA MANFAAT : Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Kewirausahaan
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
 1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang
 2. Penerima bantuan adalah SMA pelaksana Program Kewirausahaan tahun 2018;
 3. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat SMA
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. SMA Kewirausahaan tahun 2018 yang berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. SMA pelaksana Kurikulum 2013;

- b. SMA negeri atau swasta dengan akreditasi A atau B;
 - c. Memiliki praktik-praktik baik dan inovasi kegiatan dan pembelajaran kewirausahaan untuk siswa yang layak dijadikan sebagai rujukan bagi SMA lain;
 - d. Lingkungan dan sarana memadai untuk mendukung berkembangnya kewirausahaan;
 - e. Pada tahun 2018 tidak diusulkan sebagai SMA Rujukan;
 - f. Bersedia memberikan pengimbasan praktik-praktik baik dan inovasi pendidikan yang dimiliki ke SMA lain;
 - g. Diprioritaskan untuk sekolah yang selama 3 (tiga) tahun terakhir jumlah lulusan yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi lebih dari 50% jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka Provinsi dapat mengusulkan sekolah lain yang lulusan melanjutkan ke Perguruan Tingginya lebih dari 50% .
2. SMA Kewirausahaan tahun 2018 yang berdasarkan rekomendasi Direktorat Pembinaan SMA berdasarkan kinerja tahun 2017 sebagai berikut.
- a. Melaksanakan seluruh program yang telah disepakati berdasarkan *action plan* tahun 2017;
 - b. Bantuan Pemerintah tahun 2017 dimanfaatkan sesuai dengan RAB yang telah disepakati dengan Direktorat Pembinaan SMA;
 - c. Menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah tepat waktu dan memenuhi syarat laporan Bantuan Pemerintah.

Catatan:

Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengusulkan kembali SMA Kewirausahaan tahun 2017 jika memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir 1. Direktorat Pembinaan SMA akan mempertimbangkan melanjutkan sekolah tersebut jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Direktorat Pembinaan SMA juga dapat merekomendasikan penggantian SMA

Kewirausahaan tahun 2017 jika tidak memenuhi persyaratan butir 2. Penggantian SMA Kewirausahaan tetap berdasarkan kuota dan lokasi sebagaimana tahun 2017.

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kompleks Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: seksipenilaian.psm@kemdikbud.go.id
cc ke: elsi.eka@kemdikbud.go.id
Hotline :0217669205

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMERINTAH BERBASIS SEKOLAH MANAJEMEN
SISWA APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
2. TUJUAN :
 1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 2. Mendorong pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
3. SASARAN : 3.137 Sekolah Rp. 20.652.795.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Memenuhi kebutuhan ruang penunjang.
5. PENERIMA MANFAAT : Masyarakat sekitar SMA penerima bantuan.
6. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 2.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email:
subdit.pembelajaran.pasma@kemdikbud.go.id
cc ke: sarprasditpsma@yahoo.co.id
Hotline : 081282813939, 081290354999, 021-7667960

DESKRIPSI PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SEKOLAH RUJUKAN APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : SEKOLAH RUJUKAN
2. TUJUAN :
 1. Mendorong upaya sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Menumbuhkembangkan praktik-praktik baik penyelenggaraan pendidikan yang dapat dirujuk sekolah lain;
 3. Memperluas dan mempercepat ketersediaan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi.
 4. Mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah termasuk lingkungannya secara sinergis;
3. SASARAN : 650 Sekolah Model Rujukan Rp. 108.186.675.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Pengembangan penyelenggaraan pendidikan bermutu yang memenuhi standar nasional pendidikan, pelaksanaan kebijakan dan pengembangan keunggulan sekolah sehingga dapat menjadi rujukan bagi SMA yang lain.
5. PENERIMA MANFAAT : Sekolah yang ditetapkan dan dibina sebagai Sekolah Rujukan
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
 1. Penerima bantuan adalah SMA Rujukan tahun 2018;
 2. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMA
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN :
 1. SMA Pelaksana Kurikulum 2013
 2. SMA dengan Akreditasi A atau tertinggi di Kabupaten/Kota setempat;
 3. Memiliki praktik-praktik baik dan inovasi pendidikan yang layak dijadikan rujukan SMA lain;
 4. Memiliki prestasi akademik dan non akademik
 5. Mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan Indeks Integritas Ujian Nasional tahun 2016/2017 sekolah yang bersangkutan;

6. Bersedia memberikan pengimbasan praktik-praktik baik dan inovasi pendidikan yang dimiliki ke SMA lain.

8. LAYANAN INFORMASI

: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Kompleks Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email:
subdit.pembelajaran.p sma@kemdikbud.go.id
cc ke:
Hotline :021-7669205

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SEKOLAH YANG
MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013 APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013
2. TUJUAN :
 1. Mendorong upaya sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Memantapkan implementasi kurikulum;
 3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;
 4. Mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah termasuk lingkungannya secara sinergis;
3. SASARAN : 8.012 Sekolah Model Rujukan Pelaksana Kurikulum 2013 Rp. 16.414.405.000,-
4. PEMANFAATAN DANA : Meningkatkan mutu pendidikan SMA
5. PENERIMA MANFAAT : Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN : Pelaksana Kurikulum Direktorat Pembinaan SMA;
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Sekolah telah melaksanakan kurikulum 2013;
 2. Sekolah telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email:
subdit.pembelajaran.p sma@kemdikbud.go.id
cc ke:
Hotline :021-7669205

DESKRIPSI PROGRAM
SOSIALISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : SOSIALISASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
2. TUJUAN :
 1. Mendorong upaya sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Memantapkan Langkah pelaksana usaha kesehatan;
 3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah;
 4. Mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah termasuk lingkungannya secara sinergis;
3. SASARAN : 285 Sekolah alokasi anggaran Rp. 445, 611,000-
4. PEMANFAATAN DANA : Meningkatkan usaha kesehatan sekolah
5. PENERIMA MANFAAT : Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan kesehatan sekolah
6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Sekolah telah melaksanakan usaha kesehatan sekolah;
 2. Sekolah telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
8. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.kpd.psma@kemdikbud.go.id
Hotline :021-7669205

DESKRIPSI PROGRAM
SISWA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : SISWA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
2. TUJUAN : 1. Mengaktualkan Potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengaplikasikan Sikap Kerjasama, nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, peduli, berpikir kritis dan positif.
3. Menumbuhkembangkan sikap hormat dan saling menghargai dalam keberagaman.
4. Mencegah radikalisme dan terorisme di kalangan pelajar.
5. Membangun jiwa kemandirian dan kepemimpinan di kalangan pelajar
3. SASARAN : 5.000 siswa dengan alokasi anggaran Rp.43.889.792.000.
4. PENERIMA MANFAAT : Siswa Peserta lomba, olimpiade dan kegiatan peserta didik
5. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
6. KRITERIA PESERTA : Siswa Peserta Lomba, Olimpiade dan kegiatan peserta didik
7. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.kpd.psm@kemdikbud.go.id
Hotline :021-7669205

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMERINTAH BEASISWA DAN PRESTASI
APBN TAHUN 2018

1. NAMA PROGRAM : BANTUAN PEMERINTAH BEASISWA DAN PRESTASI
 2. TUJUAN :
 1. Mendorong upaya sekolah dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Memberikan penghargaan siswa yang berprestasi di bidang olah raga dan olimpiade keilmuan;
 3. SASARAN : 2.895 Siswa Rp. 10.422.000.000,-
 4. PEMANFAATAN DANA : Beasiswa
 5. PENERIMA MANFAAT : Siswa yang mengikuti lomba
 6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN : Pelaksana siswa yang berprestasi SMA;
 7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN:
 1. Siswa berprestasi
 2. Sekolah telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 8. LAYANAN INFORMASI : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.kpd.pasma@kemdikbud.go.id
Hotline :021-7669205
-

DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PEMERINTAH MENGIKUTI LOMBA, FESTIVAL DAN
OLIMPIADE APBN TAHUN 2018
Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. NAMA PROGRAM | : BANTUAN PEMERINTAH BAGI PESERTA YANG MENGIKUTI LOMBA, FESTIVAL DAN OLIMPIADE |
| 2. TUJUAN | : 1. Mengharumkan nama baik sekolah;
2. Mengharumkan diri sendiri
3. Membentuk siswa memahami pendidikan kaakter melalui olah rasa, olah seni dan olah raga. |
| 3. SASARAN | : 2.895 siswa dengan alokasi anggaran Rp. 10.577.040.000. |
| 4. PEMANFAATAN DANA | : |
| 5. PENERIMA MANFAAT | : Peserta lomba, olimpiade dan kegiatan peserta didik |
| 6. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN | |
| 7. KRITERIA PENERIMA BANTUAN | : Peserta lomba, olimpiade, kegiatan peserta didik |
| 8. LAYANAN INFORMASI | : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cipete, Gedung A Lantai 3.
PO. BOX 1131-JKS-12011
email: subdit.kpd.psma@kemdikbud.go.id |





PENUTUP

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, prioritas Nasional Bidang Pendidikan adalah “Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan SMA merumuskan tujuan strategis dalam pembangunan pendidikan SMA yakni: peningkatan akses layanan pendidikan SMA yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, dan peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Seluruh program Direktorat Pembinaan SMA berorientasi untuk mewujudkan 3 Tujuan Strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis peningkatan akses layanan pendidikan SMA yang terjangkau dan berkualitas, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2018 ini akan melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pembangunan sarana prasarana layanan pendidikan SMA (USB dan RKB). Sedangkan untuk tujuan strategis peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, program yang dipersiapkan adalah: pembangunan sarana dan prasarana mutu, implementasi kurikulum 2013, sekolah rujukan, pendidikan karakter, dan pelaksanaan olimpiade dan lomba peserta didik. Terkait dengan peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Direktorat Pembinaan SMA telah mengalokasikan anggaran untuk beberapa program untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah: penyusunan perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi program, dan program kerjasama antar lembaga.

Program yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMA tentunya bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan prioritas nasional bidang pendidikan. Kontribusi dari masyarakat dalam pembangunan pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam terwujudnya prioritas nasional tersebut. Untuk itu, perlu pelibatan publik dalam setiap upaya pembangunan pendidikan SMA. Upaya pelibatan publik diharapkan dapat membentuk kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Melalui kesadaran tersebut, akan terwujud pembangunan pendidikan sebagai sebuah gerakan nasional.



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2018



psma.kemdikbud.go.id



[direktorat.pdma](https://www.facebook.com/direktorat.pdma)



[direktorat.pdma](https://twitter.com/direktorat.pdma)



[direktorat.pdma](https://www.instagram.com/direktorat.pdma)



DITPSMA KEMDIKBUD